



Implementasi Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Peningkatan Kebersihan Kabupaten Poso

Implementation of Waste Management in Improving of Poso District Cleanliness

Herlan Lagantondo ^{a,1*}, Moh. Rusli Syuaib ^{b,2}

^{a, b} Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ herlanlagantondo5@gmail.com*; moh.rusli5@yahoo.co.id;

*korespondensi penulis

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 19-08-2021 Disetujui: 22-09-2021 Kata Kunci: Implementasi Pengelolaan Sampah Kebersihan Kabupaten Poso	Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan kebersihan Kabupaten Poso dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan kebersihan Kabupaten Poso. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni menganalisis tentang Implementasi pengelolaan sampah di Kota Poso dan teknik wawancara untuk mengetahui Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Poso. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Poso belum maksimal ini disebabkan sumber daya manusia atau tenaga ahli dalam bidang pengelolaan sampah masih kurang sehingga mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Untuk biaya operasional masih kurang sehingga masih perlu untuk ditambahkan guna bisa mencapai tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Poso. Selanjutnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah masih kurang yang berakibat pada tingkat pelayanan pengelolaan sampah tidak optimal dan menyebabkan adanya timbunan sampah di TPS. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Poso adalah adanya undang-undang, perda, dukungan dari pihak eksekutif, Legislatif, stakeholder dan motivasi dari petugas operasional tentang pengelolaan sampah. Sedangkan faktor penghambat dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Poso adalah kurangnya tenaga ahli di bidang pengelolaan sampah, dana operasional yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana, petugas kebersihan serta perlunya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah Abstract: The purpose of the study was to analyze the implementation of waste management in improving the cleanliness of Poso Regency and to find out the factors that became obstacles in the implementation of waste management in improving the cleanliness of Poso Regency. The research method used is descriptive qualitative, namely analyzing the implementation of waste management in Poso City and interview techniques to determine the implementation of waste management in Poso Regency. Based on the discussion of the research results, it can be concluded that the implementation of waste management policies in Poso City has not been maximized because the resources have not been able to overcome the waste problem. There is no human resources that expert in the field of waste management so that it affects on the performance of policy implementation. The operational costs are still lacking so it still needs to be added in order to achieve the objectives of the waste management policy in Poso City. Furthermore, the facilities and infrastructure in waste management are still lacking which results in the level of waste management services being not optimal and causing more and more waste to be piled up in the location of waste. Supporting factors for implementing waste management policies in Poso City are the existence of laws, regional regulations, support from the executive, legislature, stakeholders and motivation from operational officers regarding waste management. While the inhibiting factors for implementing waste management policies in Poso City are the lack of experts in the field of waste management, operational funds that still need to be improved, facilities and infrastructure, cleaning staff and the need for public awareness and participation in waste management.



PENDAHULUAN

Permasalahan sampah telah mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, sehingga telah menempatkannya sebagai salah satu isu utama bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia. Pertumbuhan sampah terjadi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah secara alami. Pertumbuhan penduduk yang demikian besar sudah barang tentu akan menjadi masalah bagi kota-kota besar, terutama jika dilihat dari jumlah timbunan sampah yang besar, serta pencemaran yang akan diakibatkan oleh tumpukan sampah yang tidak terangkut. Oleh karena itu pemerintah kota dituntut untuk dapat mengatasi masalah ini sebaik-baiknya, agar tidak sampai pada tahap mencemari lingkungan .

Pemerintah hendaknya mencermati secara khusus kebijakan pengelolaan sampah ini, karena dalam penanganan sampah pemerintah harus menganggarkan secara khusus, hal ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Cointreau (dalam Urban Management Programme : 2004) yang menyatakan

“bahwa untuk menghitung biaya penghimpunan persampahan kota dapat dilakukan sebagai berikut, semakin tinggi pendapatan penduduk maka semakin tinggi pula biaya penghimpunan sampahnya, hal ini dikarenakan upah-upah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tinggi. Tetapi biaya penghimpunan dalam persen terhadap total pendapatan kecil, mengingat pendapatan di negara industri sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang dimana income per kapita kecil”.

Berbagai konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli sangat bervariasi bentuknya. W. Dunn (Wibawa, 2005:50) menyatakan bahwa kebijakan public adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Thomas R. Dye (Winarno, 2009:2) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya James Anderson menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan. Di samping itu kebijakan public dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan dengan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (*issue areas*) yaitu arah tindakan actual atau potensial dari pemerintah yang di dalam nya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat (Dunn, 2005 :63-64).

Beberapa konsep kebijakan publik di atas, pada dasar nya memandang kebijakan publik sebagai tujuan untuk memenuhi tuntutan aktor kebijakan. Hal yang sama dikemukakan oleh Wahab (1997:4) yakni serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Definisi di atas memberikan gambaran bahwa kebijakan public terjadi karena tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut.

Sabatier dan Mazmanian mengemukakan bahwa implementasi merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai, dan dalam berbagai cara ‘menggambarkan struktur’ proses implementasi tersebut (2003 : 67).

Sementara itu George C Edward III menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan (Wahab, 1997)

Bardach dalam Wahab (1997) mengartikan proses implementasi sebagai suatu system pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pengelolaan sampah di Kabupaten Poso, dalam penelitian ini dijadikan variabel. Dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pengelolaan sampah di Kabupaten Poso, penulis mencoba mengacu pada beberapa model yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Berangkat dari pendapat para ahli studi implementasi dicari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan di lapangan. Temuan terhadap faktor-faktor tersebut diformulasikan dan disesuaikan dengan pendapat dari beberapa ahli studi implementasi. Adapun model studi implementasi yang oleh George C. Edward III adalah yang dimulai dengan pertanyaan: ‘prakondisi-prakondisi apa untuk implementasi kebijakan yang berhasil’? Berkaitan dengan pertanyaan ini, Edward menjawab bahwa yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ada empat variable krusial yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi (Winarno, 2002).

Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:

Sampah rumah tangga, Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah spesifik, meliputi :

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. Sampah yang timbul akibat bencana;
4. Puing bongkaran bangunan;
5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Mencermati pernyataan di atas jelas bahwa biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah berbanding lurus atau sebanding dengan tingkat pendapatan suatu masyarakat. Hal ini membawa implikasi

bahwa biaya pengelolaan sampah yang dibutuhkan untuk daerah perkotaan pasti akan lebih besar daripada pengelolaan sampah di pedesaan. Untuk itu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperhatikan masalah pengelolaan sampah ini dengan baik, dengan manajemen pengelolaan sampah sesuai standar yang telah ditetapkan. Dan mulai memperhatikan pengelolaan sampah ini dengan memperhatikan kelembagaan khusus yang bertanggung jawab akan pengelolaan sampah, dan masalah teknis operasional dalam pengelolaan sampah, termasuk diantaranya dalam peletakan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Pemerintah harus membuat program kebersihan kota dan penanggulangan sampah secara berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah tertuang jelas tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggarakannya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Hal ini berarti bahwa pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Program pengelolaan sampah pada umumnya sudah dilaksanakan oleh hampir semua pemerintah daerah kota/kabupaten di seluruh nusantara, termasuk Kota Poso. Kota Poso sebagai ibukota Kabupaten Poso provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami perkembangan pesat, yang diikuti pula dengan permasalahan khas perkotaan. Saat ini Pemerintah Kab Poso menaruh perhatian serius dalam pengelolaan sampah ini. Hal ini menandakan keseriusan pemerintah Kab Poso untuk mengatasi permasalahan sampah dengan melibatkan pemerintah Kelurahan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan sampah tersebut

Kota Poso merupakan ibu Kota Kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah Oleh karena itu perlu diperhatikan adanya suatu keadaan yang bersih, rapi, tertib, aman, dan bebas dari polusi kendaraan, manusia maupun ternak. Namun dewasa ini keadaan kab Poso semakin terancam oleh perilaku manusia yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan kota, yang sengaja atau tidak sengaja membiarkan terjadinya penumpukan sampah dimana-mana.

Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek maupun aturan dengan implementasi. Hasil yang diharapkan dengan diluncurkan kebijakan Pengelolaan sampah adalah bagaimana Pemerintah daerah dapat menumbuhkan kembangangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengatasi permasalahan sampah. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam kajian ini adalah “Bagaimana implementasi pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan kebersihan Kab Poso?”. Serta apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pengelolaan sampah di Kab Poso.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif, yakni pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan kebersihan Kota Poso dan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan kebersihan Kota Poso. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Lawanga (Poso Kota Utara), Kelurahan Gebangrejo (Poso Kota) Kelurahan Sayo (Poso Kota Selatan).

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Lawanga (Poso Kota Utara 3 Orang), Kelurahan Gebangrejo (Poso Kota 3 Orang) Kelurahan Sayo (Poso Kota Selatan 3 Orang). Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan kebersihan Kota Poso dan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan kebersihan Kota Poso maka pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan analisis model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011:334) dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

- a. Reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokoknya.
- b. Penyajian data. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan organisasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lainnya.

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Verifikasi data dimulai sejak permulaan pengumpulan data sampai ditemukan bukti baru maka kesimpulan awal tersebut tidak berubah. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan sudah kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan kebersihan Kabupaten Poso

Proses awal pengelolaan sampah di Kota Poso terkait langsung dengan sumber sampah adalah pemilihan. Pemilihan sampah adalah suatu cara untuk memilih sampah berdasarkan sifat dan jenis sampah. Selanjutnya dilakukan pengumpulan ke TPS kemudian pengangkutan ke TPA dan terakhir pemanfaatan/pemusnahan. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi penempatan. Lebih jelasnya kondisi pengelolaan sampah di Kota Poso adalah sebagai berikut:

1) Pemilihan

Menurut Standar Nasional Indonesia Nomor 19-2454-2002 yang dimaksud dengan pemilahan sampah adalah proses pemisahan sampah berdasarkan jenis sampah yang dilakukan sejak dari sumbernya sampai dengan pembuangan akhir. Masyarakat di Kota Poso dalam membuang sampah belum memisahkan sampah berdasarkan sifat dan jenis sampah. Pemilihan sampah masih dilakukan oleh petugas kebersihan dan pemulung.

2) Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Menurut Standar Nasional Indonesia Nomor 19-2454-

2002 tentang tata cara pengelolaan sampah di pemukiman menjelaskan bahwa : Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) pola yaitu pola individual dan pola komunal. Proses pengumpulan sampah di Kota Poso dilakukan oleh organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah tetapi hanya dari sumber sampah sampai ke TPS saja sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Poso hanya menyediakan TPS berupa Kontainer/bak sampah sampai pengangkutan dari TPS ke TPA.

3). Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi sumber sampah atau dari TPS ke TPA. Proses pengangkutan sampah di Kota Poso dari TPS ke TPA menggunakan alat angkut, *Dump Truck* dan *Amroll Truck*. Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yang biasanya jauh dari kawasan perkotaan dan permukiman.

4) Pemanfaatan/Pemusnahan

Pemanfaatan dan pemusnahan sampah dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tempat Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Secara umum teknologi pengelolaan sampah menurut Standar Nasional Indonesia dibedakan menjadi 3 metode yaitu:

(a) Metode *Open Dumping*

(b) Metode *Controlled Landfill* (penimbunan terkendali) .

(c) Metode *Sanitary landfill* (lahan urug saniter)

Pemanfaatan sampah di TPA masih dilakukan oleh pemulung, sampah – sampah yang dipilah dan dimanfaatkan oleh pemulung berupa plastik yang berasal dari botol minuman mineral dan kaleng aluminium bekas minum atau sampah – sampah yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dijual cepat. Sedangkan pengelolaan sampah di TPA menggunakan metode *Sanitary landfill*. Berdasarkan hasil penelitian di Kota Poso pada Kelurahan Lawanga, Gebangrejo, Dan Sayo, diperoleh hasil tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dikaji menurut model Van Metter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengelolaan sampah. Peneliti berpendapat bahwa persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara kedua pihak agar dapat mencapai maksud dan tujuan bersama untuk bisa menciptakan lingkungan yang sehat.

2) Sumber Daya

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu memperhatikan sumber daya untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu kebijakan publik.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan kebersihan Kabupaten Poso

(1) Sumber daya Manusia

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Poso ditinjau dari aspek sumber daya manusia masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas dalam rangka pencapaian suatu tujuan dari pelaksanaan suatu perda.

(2) Biaya Operasional

Hal terpenting dalam manajemen persampahan adalah aspek keuangan. Manajemen persampahan adalah merupakan suatu *public utility* yang seharusnya dibiayai dari publik, tetapi untuk sementara waktu sebagian besar pembiayaan masih dari pemerintah. Pengelolaan persampahan membutuhkan dana yang cukup tinggi komponen biaya itu terdiri dari biaya investasi sarana dan prasarana, gaji pegawai, biaya operasional pengelolaan, biaya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan. Biaya pengelolaan persampahan ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso serta bantuan dari Pemerintah Provinsi. Peneliti berpendapat bahwa untuk melaksanakan kegiatan apapun agar tercapai hasil yang diharapkan maka harus didukung dana yang memadai. Tanpa ada dukungan dana maka kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan optimal.

(3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses implementasi kebijakan peraturan daerah. Seiring dengan kondisi perkembangan Kota Poso maka akan mengakibatkan tuntutan pemenuhan kebutuhan penduduk akan sarana dan prasarana agar semakin ditingkatkan termasuk dalam hal persampahan. Apabila Volume sampah semakin tinggi dan tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana persampahan maka akan berdampak pada tingkat pelayanan dari pengelolaan sampah yang rendah. Peneliti berpendapat untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Poso masih perlu untuk ditambahkan hal ini sesuai dengan perkembangan pembangunan Kota yang akan berjalan seiring dengan berkembangnya zaman dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Peneliti berpendapat bahwa dalam perancangan Perda harus mempertimbangkan pengorganisasian, satandar

operasional prosedur pengelolaan sampah dan harus mempunyai naskah akademik sehingga agen pelaksana dapat memahami maksud dan tujuan peraturan Daerah tersebut.

5) Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Sikap para pelaksana merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kinerja implementasi kebijakan, dalam implementasi kebijakan pengelolaan kebersihan di Kota Poso sudah melaksanakan uji publik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting karena masyarakat adalah target dari suatu kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah bisa meliputi pengelolaan lingkungan, membayar retribusi yang telah ditetapkan, pengadaan tong sampah dan sebagainya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tergantung bagaimana pendekatan pemerintah setempat dalam mensosialisasikan programnya dalam pengelolaan kebersihan. Peneliti berpendapat bahwa Tanpa adanya partisipasi masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan pada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Poso masih perlu ditingkatkan. Untuk sumber daya manusia kurangnya tenaga ahli dalam bidang pengelolaan sampah sehingga mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Untuk biaya operasional masih perlu untuk ditambahkan guna bisa mencapai tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Poso. Selanjutnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah masih perlu ditambah sehingga menyebabkan semakin banyaknya timbunan sampah di TPS dan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Poso adalah adanya undang-undang, perda, dukungan dari pihak eksekutif, Legislatif, stakeholder dan motivasi dari petugas operasional tentang pengelolaan sampah. Adapun beberapa hal yang disarankan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Agar dalam penempatan jabatan di Dinas Lingkungan Hidup harus sesuai dengan disiplin ilmunya dan juga ditempatkan tenaga ahli dalam bidang pengelolaan sampah.
- 2) Agar menambahkan dana operasional pengelolaan kebersihan sehingga bisa mewujudkan Kota Poso yang bersih.
- 3) Perlunya penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seiring dengan perkembangan Kota Poso dengan tujuan peningkatan pelayanan pengelolaan sampah.
- 4) Agar untuk menambah petugas kebersihan Kota.

- 5) Perlunya sosialisasi dan penyuluhan secara terus menerus dari pemerintah Kota Poso kepada masyarakat sehingga akan ada sinerjitas antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press, Surabaya
- Effendi, Sofyan.,. 2000, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Materi Kuliah MAP-UGM, Yogyakarta.
- Keban, Yeremias T., 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isyu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta
- _____ 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Steers, Richard M., Magdalena Yamin, (pentj),1995, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta
- Widayatun,T,R. 2009. *Ilmu Perilaku M.A.104*. Jakarta : CV Agung Seto
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*